

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era yang sekarang ini, laporan keuangan daerah menjadi salah satu hal yang disoroti oleh masyarakat luas. Laporan keuangan adalah bagian dari pelaporan keuangan yang dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan terkait dengan posisi keuangan serta semua transaksi yang selama satu periode pelaporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi (pendapatan belanja, transfer, pembiayaan) dengan anggaran yang telah diterapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Pemerintah daerah dituntut agar pengelolaan keuangan daerah dengan baik dalam mewujudkan tujuan pemerintah yang baik (good government) dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparansi dan akuntabel. Hal ini diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 mengenai keuangan daerah. Pemerintah Daerah dikatakan berhasil dalam menjalankan suatu pemerintahannya apabila dapat menyajikan laporan keuangan secara transparan serta dapat digunakan sebagai acuan untuk cara pemakaian penggunaan laporan keuangan (Nurillah, 2014).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari

kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (QS An - Nisa 135).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa setiap orang harus selalu dalam kebenaran untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam etika profesi akuntan, kejujuran sangat diperlukan demi kebaikan bersama. Karena jika hanya mengikuti hawa nafsu demi keuntungan pribadi akan merugikan pengguna laporan keuangan. Demi mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi serta paham dalam akuntansi pemerintah yang didukung dengan pengetahuan dan pengalaman di bidang akuntansi. Pengelolaan keuangan yang baik harus dikelola oleh SDM yang berkompeten dan menguasai teknologi informasi. Apabila sumber daya manusia tidak memenuhi syarat akan menimbulkan masalah seperti hambatan dalam pengelolaan keuangan. Penelitian Roviyantie dan Devi (2011) menjelaskan jika kompetensi SDM memberikan pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah yang mana kompetensi sumber daya manusia dalam membuat laporan keuangan pemerintahan yang semakin baik akan membuat kualitas laporan keuangan daerah yang akan dihasilkan juga semakin baik. Berbeda dengan dengan penelitian Wijayanti dan Lilis (2017) dalam penelitiannya kompetensi SDM tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah karena SKPD wilayah tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi.

Laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta paham dalam akuntansi pemerintah yang didukung dengan pengetahuan dan pengalaman di bidang akuntansi. Pengelolaan keuangan yang baik harus dikelola oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan menguasai teknologi informasi. Apabila sumber daya manusia tidak memenuhi syarat akan menimbulkan masalah seperti hambatan dalam pengelolaan keuangan. Dalam penelitian Andini dan Yusrawati, 2005 menyatakan bahwa kompetensi sumber daya

manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mana semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia dalam membuat laporan keuangan pemerintah maka semakin baik kualitas laporan keuangan daerah yang akan dihasilkan. Berbeda dengan dengan penelitian Wijayanti, 2007 dalam penelitiannya kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah karena SKPD wilayah tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi.

Sistem pengendalian internal ialah proses yang integral pada tindakan dan aktivitas yang dilaksanakan secara kontinyu oleh pimpinan dan semua tenaga kerja untuk memberi keyakinan yang representatif atas terealisasinya tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif dan efisien. Pengendalian internal mencakup kebijakan dan proses yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin ataupun menyediakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yakni pemakaian PP No. 60 Tahun 008 dalam instansi pemerintah untuk menjadi acuan dalam melaksanakan kode etik dan menilai risiko untuk mengendalikan lingkungan internal. Lingkungan pengendalian instansi pemerintah akan meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan menggunakan kode etik secara tertulis dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada dan dengan transaksi-transaksi yang benar terjadi jadi informasi dalam laporan keuangan memberi gambaran secara jujur atau wajar dan membuat laporan keuangan menjadi relevan dan handal jadi semakin baik pemakaian SPIP maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat. Disamping terdapatnya pengendalian internal difungsikan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem pengendalian internal akuntansi yang baik, resiko timbulnya kesalahan pencatatan ataupun perhitungan bisa diminimalisir dengan begitu akan mencegah kesalahan yang dimungkinkan terjadi. Sistem pengendalian internal yang ada di perusahaan adalah salah satu aspek penentu kepercayaan ataupun

keadilan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Perusahaan perbankan disarankan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang dibuatnya dengan baik melalui media cetak, internet ataupun media yang lain.

Laporan keuangan pemerintah daerah juga membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud ialah penerapan aplikasi komputer akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputer akuntansi di pemerintahan daerah dapat mempermudah proses pencatatan, penyajian dan analisis di dalam laporan keuangan daerah, sebab diciptakannya aplikasi komputer akuntansi bertujuan untuk mengontrol isi transaksi akuntansi ke dalam suatu laporan dan analisis laporan sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan terkait dengan kondisi keuangan dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah tertuang pada PP No. 56 Tahun 2005 mengenai sistem informasi keuangan daerah yang sebagai peraturan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 mengenai sistem informasi keuangan daerah. Manfaat lain dari penggunaan teknologi informasi ini adalah mempermudah proses transaksi, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah yang besar dan kemampuan multi processing. Disamping terdapatnya pengendalian internal yang difungsikan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem pengendalian internal akuntansi yang baik resiko terjadi kesalahan pencatatan ataupun perhitungan bisa diminimalisir jadi mengantisipasi adanya kesalahan yang dapat terjadi. Dalam penelitian Julita dan Susilastri (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berarti pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik atau semakin baik. Harnoni (2016) Hal ini karena informasi serta kurangnya pelatihan dan keterbatasan anggaran dalam pengembangan teknologi informasi itu sendiri.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi komputer sangat penting untuk meningkatkan kemampuan

pemerintah daerah dalam mengelola laporan keuangan daerah. Oleh karena itu pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dirasakan sangat penting untuk menyalurkan informasi keuangan daerah kepada masyarakat sebagai pelayanan publik. Selain itu kompetensi SDM yang mana dalam hal tersebut adalah staf pengelola keuangan juga sebagai faktor utama dalam penyusunan laporan keuangan yang mempunyai kualitas nilai informasi yang baik jadi bisa dipakai oleh pengguna informasi laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia harus sejalan dengan regulasi yang diterapkan pada pemerintah yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan berdasarkan SAP merupakan media yang digunakan oleh entitas berkhusus pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan pada yang berkepentingan. Standar akuntansi pemerintah dapat menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola keuangan dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar tersebut didukung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. SAP berbasis akrual dalam Permendagri No 64 Tahun 2013 merupakan SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, hutang dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual serta mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dan APBD. Diberlakukannya SAP berbasis akrual maka peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi sudah pasti akan berubah dari sebelumnya berbasis kas menuju akrual menjadi SAP berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memberikan informasi yang lebih baik tetapi implementasinya lebih rumit dibandingkan SAP berbasis kas menuju akrual. Tujuan utama diterapkannya SAP berbasis akrual adalah untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparansi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masing-masing memperoleh penilaian berupa opini yang dilakukan setiap tahunnya dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

yang berarti laporan keuangan tersebut sudah bisa disebutkan berkualitas. Selain opini WTP – DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjas dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjas. Keadaan misalnya adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup Lembaga pengelolaan keuangan. Selain itu juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain. Wajar Dengan Pengecualian (WDP), adalah opini audit yang diterbitkan jika Sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Apabila laporan keuangan mendapatkan opini Tidak Wajar (TW). Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapat opini jenis ini maka auditor meyakini laporan keuangan perusahaan atau pemerintah diragukan kebenarannya sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Apabila para audit tidak bisa memberi pendapat, maka laporan tersebut dikatakan tidak layak untuk digunakan dan diberikan opini berupa Tidak Memberi Pendapat (TMP). Fenomena terkait dengan kualitas pelaporan keuangan Kabupaten Bantul, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul (Pemkab Bantul) pada tanggal 23 April 2020 diterima

langsung oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih di kantor BPK perwakilan di Yogyakarta.

Tabel 1.1
Opini LKPD Pemerintah Se-DIY
Tahun 2012-2020

No	Entitas	Opini LKPD								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kota Yogyakarta	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Bantul	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab. Gunung Kidul	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab. Kulon Progo	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab. Sleman	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: <http://yogyakarta.bpk.go.id/>

Kabupaten Bantul mendapatkan opini WTP 8 tahun berturut-turut, lebih baik dari pada 4 wilayah lainnya, dan hanya pada tahun 2012,2013 dan 2014 mendapat tambahan paragraf penjelasan. Dalam hal ini peneliti memilih Kabupaten Bantul sebagai objek penelitian karena pemerintah kabupaten Bantul mampu mendapatkan opini WTP dalam membuat serta menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas pada tahun 2012-2020. Predikat WTP dapat diartikan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul mampu menjalankan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Harnoni pada tahun

2016 yang berjudul “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Anambas, dengan perubahan variabel sistem pengendalian internal menjadi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Pergantian variabel karena belum ada faktor eksternal dalam penelitian tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan satu variabel baru yang memungkinkan bisa memberikan pengaruh terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah.

Dari sejumlah pendapat di atas mendorong penulis untuk mengembangkan penelitian tentang “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bantul”.

B. BATASAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah diterapkan tersebut dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam mengenai laporan keuangan pemerintah daerah yaitu penelitian ini akan menguji kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia secara positif mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
2. Apakah sistem pengendalian internal secara positif mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

3. Apakah pemanfaatan teknologi secara positif mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah secara positif mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dan maksud dari penelitian ini setelah dirumuskannya masalah diatas yaitu :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan atau wawasan di akuntansi sektor publik terutama pada masalah sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan menjadi bahan pertimbangan mengenai kualitas laporan keuangan sehingga para aparatur pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan mengenai sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.

d. Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai referensi bahan kajian bagi mahasiswa yang lain dan menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian yang akan datang.